

Defense Economic Diplomacy in Overcoming the Impact of the Israel - Hamas War on Indonesia's Economic Resilience

Ivan Yulivan^{1*}, Jonni Mahroza², Rianto³, Lukman Yudho Prakoso⁴, Muhammad Ikmal Setiadi⁵

^{1,2,4,5}Universitas Pertahanan RI

³Universitas Trisakti

Corresponding Author: Ivan Yulivan ivan36yulivan@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords : Economy, Conflict, Resilience, Israel, Palestine

Received : 01 December

Revised : 23 December

Accepted: 26 January

©2024 Yulivan, Mahroza, Rianto, Prakoso, Setiadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



One of the most real threats from the increasingly heated Hamas-Israel conflict is the soaring world crude oil prices. Geographically, the proximity of the conflict in the Middle East is quite close to oil-producing countries. If the supply or distribution of oil from this area is disrupted. A significant increase in oil prices in a short time can have a tremendous shock effect on the market, the impact of this increase in commodities will spread to the national economy. This research was conducted using descriptive analysis. The process of Israel's annexation of Palestine will be described and analyzed in detail. The Indonesian government, through the first paragraph of the preamble to the 1945 Constitution, has the obligation to realize world peace by creating a new environment free from sovereignty conflicts, and clear and well-defined authority over economic activities that can take the Palestinian economy further towards the path of higher development and growth. Playing a direct diplomatic role by becoming the fifth of four countries currently the main actor in maintaining peace in the Middle East.

Diplomasi Ekonomi Pertahanan dalam Mengatasi Dampak Perang Israel - Hamas terhadap Ketahanan Perekonomian Indonesia

Ivan Yulivan^{1*}, Jonni Mahroza², Rianto³, Lukman Yudho Prakoso⁴, Muhammad Ikmal Setiadi⁵

^{1,2,4,5}Universitas Pertahanan RI

³Universitas Trisakti

Corresponding Author: Ivan Yulivan ivan36yulivan@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Kata Kunci: Ekonomi, Konflik, Ketahanan, Israel, Palestina

Received : 01 Desember

Revised : 23 Desember

Accepted: 26 Januari

©2024 Yulivan, Mahroza, Rianto, Prakoso, Setiadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Salah satu ancaman paling nyata dari konflik Hamas-Israel yang semakin memanas ialah melonjaknya harga minyak mentah dunia. Secara geografis, proksimitas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah ini cukup dekat dengan negara-negara penghasil minyak. Apabila pasokan atau distribusi minyak dari kawasan ini terganggu. Naiknya harga minyak secara signifikan dalam waktu singkat bisa memberikan efek kejut luar biasa ke pasar, dampak kenaikan komoditas ini akan menjalar pada perekonomian nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Proses aneksasi wilayah Israel atas Palestina akan diuraikan dan dianalisis secara detail. Pemerintah Indonesia melalui paragraph pertama pembukaan UUD 1945 memiliki kewajiban mewujudkan perdamaian dunia dengan menciptakan lingkungan baru yang bebas dari konflik kedaulatan, dan otoritas yang jelas dan terdefinisi dengan baik atas kegiatan ekonomi dapat membawa ekonomi Palestina jauh menuju jalur pembangunan dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Memainkan peran diplomasi secara langsung dengan menjadi negara kelima dari empat negara yang saat ini sebagai aktor utama dalam menjaga perdamaian di timur tengah.

PENDAHULUAN

Sejak Oktober 2000, Israel dan otoritas Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah terjerat dalam konfrontasi berdarah yang merenggut ribuan korban dari kedua belah pihak. Setelah upaya mediasi untuk mencari solusi yang tak terhitung jumlahnya oleh komunitas internasional, krisis antar kedua belah pihak tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan intensitasnya terus meningkat oleh dinamika eskalasi dari satu sisi dan kontra-eskalasi dari sisi lain. Ini telah menghancurkan harapan untuk resolusi damai untuk konflik Palestina-Israel yang diangkat oleh penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Upaya masyarakat internasional untuk mengakhiri kekerasan dan menyelamatkan Kesepakatan Oslo terbukti menjadi upaya yang-karena perjanjian itu sendiri cacat dan tidak dapat dilanjutkan. Kesepakatan itu, serta upaya internasional saat ini yang dipimpin oleh AS untuk menghidupkan kembali itu, gagal mengatasi dua isu sentral konflik: hak Palestina atas kedaulatan atas tanah mereka dan hak mereka untuk membebaskan ekonomi mereka dari ketergantungan terhadap ekonomi Israel. Dengan mempertahankan status quo, kesepakatan Oslo dan upaya internasional saat ini untuk menghidupkannya kembali, menangani gejala konflik (kekerasan) dan mengabaikan penyebabnya (kedaulatan).

Salah satu ancaman paling nyata dari konflik Hamas-Israel yang semakin memanas ialah melonjaknya harga minyak mentah dunia. Secara geografis, proksimitas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah ini cukup dekat dengan negara-negara penghasil minyak. Apabila pasokan atau distribusi minyak dari kawasan ini terganggu, harga minyak pun kemungkinan akan terdorong dari sisi suplai. Naiknya harga minyak secara signifikan dalam waktu singkat bisa memberikan efek kejut luar biasa ke pasar. Karena meresap dalam proses produksi dan distribusi berbagai produk di nyaris setiap industri, dampak kenaikan komoditas ini akan menjalar. Belum lama, konflik Rusia-Ukraina menjadi contoh bagaimana disrupsi di sektor energi ini menghantam laju perbaikan ekonomi pascapandemi. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, krisis energi sebagai eksese konflik juga pernah terjadi. Hal ini terjadi pada Perang Yom Kippur 50 tahun lalu. Saat itu, organisasi negara pengekspor minyak di Arab (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries/OAPEC) melakukan embargo kepada AS sebagai langkah retaliasi atau pembalasan.

Setelah dua hari sejak peristiwa 7 Oktober 2023 harga minyak mentah Brent naik 4,18 dollar AS ataupun 4,94% menjadi 88,76 dollar AS/barel. Sementara minyak mentah *West Texas Intermediate* (WTI) AS berada pada harga 87,02 dollar AS per barel, juga naik 4,23 dollar AS atau 5,11%. Tren kenaikan harga minyak mentah dunia kembali pada titik stabilnya pada minggu lalu, menyusul penurunan mingguan paling tajam sejak Maret 2023. Harga minyak Brent turun sekitar 11%, sementara WTI turun > 8%. Penurunan itu akibat kekhawatiran soal suku bunga tinggi yang berpotensi menurunkan permintaan minyak secara global. Namun, saat ini sentimen pengurangan pasokan akibat konflik di Jalur Gaza membuat tren harga minyak berbalik naik.

Krisis kemanusiaan yang terjadi akibat meningkatnya konflik Hamas-Israel di wilayah Gaza telah mendorong meningkatnya seruan boikot oleh

konsumen Israel terhadap barang dan merek yang berafiliasi dengan negara tersebut. Berdasarkan temuan kajian Litbang Kompas, Unilever, gerai kopi Starbucks, dan McDonald's merupakan tiga korporasi yang sering masuk dalam daftar boikot yang disebarluaskan di berbagai platform media sosial. Mereka yang aktif menganjurkan boikot percaya bahwa ketiga produk tersebut memiliki kecenderungan untuk mendukung kebijakan pemerintah Israel terhadap pendudukan atas Palestina. Menurut laporan, nilai saham Starbucks telah merosot 8,96% sejak pertengahan November 2023 sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 171,3 triliun (setara US\$ 11 miliar). Ini merupakan kerugian paling signifikan yang dialami organisasi ini sejak tahun 1992. Saat ini, valuasi saham Starbucks telah menurun dari US\$ 115 menjadi sekitar US\$ 95. Jelas sekali, Israel khawatir mengenai konsekuensi dari kerugian ini. Israel telah memberikan penekanan diplomatik yang signifikan untuk mengatasi gerakan *Boycott, Divestment, dan Sanction* (BDS) dalam beberapa waktu terakhir (Nugraha, 2023).

Tulisan ini terbatas pada aspek ekonomi dari konflik. Dengan menganalisis hubungan ekonomi antara ekonomi Israel dan ekonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan dinamis antara keduanya serta pengaruhnya pada ekonomi global dan nasional. Analisis ini akan mengungkapkan berbagai anomali dalam hubungan, yang pada praktiknya merupakan prasyarat untuk setiap upaya serius dan tulus untuk menghidupkan kembali proses perdamaian dan memungkinkan dimensi ekonomi untuk mempromosikan keamanan bagi kedua belah pihak. Bagian kedua menguraikan perspektif sejarah, menelusuri peristiwa yang terjadi dari penandatanganan Kesepakatan Oslo pada tahun 1993 lalu peran non-mediasi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang diambil hingga potensi perubahan peran menjadi mediasi langsung guna mencari solusi damai yang adil dari konflik berkepanjangan yang kian memanas sejak peristiwa 7 Oktober 2023. Bagian ketiga memberikan kerangka teoritis di mana hubungan antara kedua ekonominya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kedaulatan Negara

Raia Prokhovnik (2007) dengan bukunya yang berjudul *Sovereignties Contemporary Theory and Practice*, ia membedakan kedaulatan internal dan eksternal sebagai dua komponen kedaulatan. Kedaulatan internal mengacu pada kapasitas suatu negara untuk menetapkan atau menegakkan prinsip-prinsip hukum sebagai otoritas tertinggi dan untuk memerintah secara sah dalam yurisdiksinya. Di sisi lain, kedaulatan eksternal berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk terlibat dalam misi diplomatik di luar negeri, mengatur perdagangan, mengadakan aliansi dan perjanjian, dan berperang sebagai sarana untuk memajukan kepentingan negara. Sejauh ini dalam bukunya, Prokhovnik telah mengemukakan bahwa kedaulatan eksternal berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan peperangan, termasuk namun tidak terbatas pada mencegah perang, melegitimasi perang, membangun aliansi strategis untuk mengoptimalkan posisi suatu negara, dan perangkat keras militer. Oleh karena itu, sengketa wilayah menjadi isu sentral dalam pembahasan kedaulatan.

2. Teori Suksesi Negara

Cafilisch (2009) dengan bukunya yang berjudul *The Law of State Succession Theoretical Observations*. Sesuai dengan asas hukum internasional, apabila suatu negara memperoleh penguasaan atas suatu wilayah yang dahulu berada di bawah penguasaan negara lain, hal itu berarti "suksesi negara dalam arti faktual" (*factual state succession*). Oleh karena itu, penerus wilayah (*territorial successor*) wajib menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sekurang-kurangnya sama hakekatnya dengan hak-hak yang sebelumnya dipegang oleh penguasa wilayah yang digantikannya (*territorial predecessor*).

3. Teori Multitrack Diplomacy

Louise Diamond dan John McDonald (1996) mengungkapkan bahwa, Konsep diplomasi "*multitrack diplomacy*" menggambarkan bagaimana sistem internasional mencapai perdamaian dunia dengan menggunakan kombinasi diplomasi jalur individu, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur pemerintah. Tujuan utama *multitrack diplomacy* adalah untuk membangun perdamaian global dan memfasilitasi *peacebuilding* melalui penerapan strategis *soft power*. Penerapan *soft diplomacy*, khususnya terjalinnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain pada abad ke-21 dengan penekanan pada soal *low politics* di salah satu sektor ekonomi industri, merupakan contoh penggunaan *soft power* untuk mendorong perdamaian.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Suatu pendekatan penelitian yang menganalisis suatu objek melalui penjelasan masalah dan situasi untuk memperoleh gambaran yang akurat dan lengkap. Aneksasi Israel atas wilayah Palestina akan diuraikan secara rinci dan dianalisis secara mendalam. Metodologi yang digunakan adalah metodologi historis. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fakta-fakta sejarah yang menjadi landasan perwujudan suatu fenomena saat ini. Investigasi ini akan mengkaji rangkaian peristiwa menjelang penaklukan Israel atas sebagian besar wilayah Palestina.

Sumber data sekunder digunakan, termasuk artikel ilmiah terkini terkait isu Palestina-Israel, outlet berita online yang bereputasi dan terpercaya yang meliputi konflik Palestina-Israel, dan volume referensi sejarah yang berkaitan dengan konflik tersebut. Informasi tersebut dikumpulkan melalui sumber media online, antara lain artikel ilmiah, situs resmi penerbit buku, dan portal berita internasional.

Proses analisis data terdiri dari empat tahap yang berbeda, dengan tahap awal terdiri dari pengorganisasian sumber data yang dikumpulkan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis data yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang tidak relevan akan dibuang ke folder terpisah yang berisi data terkait yang dikumpulkan. Tahap selanjutnya ditandai dengan kritik. Data sebelumnya yang berkaitan dengan penyelidikan saat ini harus dianalisis isi. Hal ini untuk memastikan apakah sumber data tersebut asli, palsu, turunan, atau palsu. Pada tahap akhir terjadi interpretasi data. Permasalahan penelitian akan dikaitkan dengan fakta sejarah. Setelah itu, dilakukan analisis komprehensif untuk

mengetahui relevansinya dengan pokok bahasan. Fase terakhir terdiri dari pemaparan temuan laporan penelitian secara historiografis. Pengarang secara konsisten menjalin hubungan antar peristiwa guna membangun rangkaian fakta sejarah yang komprehensif dan menyeluruh ketika menyusun karyanya. Tahap ini mengakhiri proses analisis data.

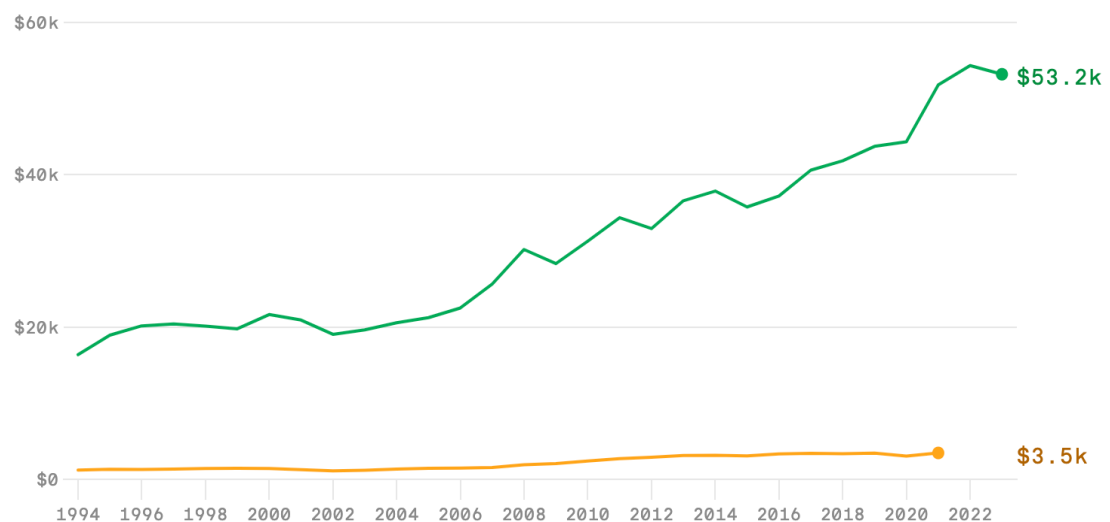
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Palestina – yang meliputi Tepi Barat dan Gaza yang diduduki – diperkirakan akan tumbuh sebesar 3% tahun ini. Kemudian serangan oleh Hamas pada 7 Oktober terjadi. Sekarang, PDB Palestina kemungkinan akan menyusut sebesar 3% pada tahun 2023, dengan pendapatan per kapita turun sebesar 5%, per perkiraan dari Biro Pusat Statistik Palestina. Bahkan sebelum konflik saat ini, lebih dari separuh orang di Gaza hidup dalam kemiskinan, dan 60% menderita kerawanan pangan. Kombinasi perang dan resesi hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan Gaza. Pendapatan per kapita di Gaza sekarang hanya setengah dari jumlah yang terlihat di Tepi Barat (Alasttal et al., 2023).

Akibatnya, Gaza menyumbang kurang dari 18% dari PDB Palestina, turun dari 34% sebelum blockade ketat diberlakukan oleh Israel pada tahun 2007, menurut biro statistik. Gaza telah berada di bawah pemboman intensif dari Israel sejak 7 Oktober, dan Israel sedang bersiap untuk meningkatkan perang dengan invasi darat. Pada 16 Oktober, lebih dari 2.185 bangunan dan 8.840 unit rumah telah hancur total, per biro, bersama dengan penghancuran sebagian lebih dari 89.000 unit rumah. Pembangunan kembali properti yang hancur pada titik ini adalah satu-satunya kegiatan ekonomi yang tersisa di Gaza. Semua kegiatan ekonomi selain yang terkait dengan "kerugian properti dan aset tetap" kini telah terhenti (Fraihat, 2022).

GDP per capita in Israel and the West Bank and Gaza

Annually; 1994–2023



Note: West Bank and Gaza GDP data is unavailable for 2022 and 2023; Data: IMF; Chart: Axios Visuals

Gambar 1. Grafik GDP Perkapita Israel dan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza

Sumber: Salmon, 2023

1. Perjanjian Oslo Dan Pemerintahan Mandiri Terbatas Palestina

Pada tanggal 13 September 1993, Israel dan *Palestina Liberation Organisation* (PLO) menandatangani *Declaration of Principles* (DoP) di Washington DC, mengakui satu sama lain dan memutuskan untuk menerapkan beberapa langkah tertentu secara bertahap, serta menegosiasikan akhir dari konflik berkepanjangan mereka. Sebagaimana ditentukan dalam DoP, pada Mei 1994, sebuah pemerintahan mandiri terbatas Palestina didirikan di atas bagian-bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kemajuan dalam perundingan damai ini menimbulkan harapan tinggi untuk perbaikan wilayah Palestina. Pemerintahan mandiri Palestina dianggap berhasil dalam membebaskan Tepi Barat dan Jalur Gaza dari kondisi keras atas pendudukan Israel, yang dimulai dengan perebutan wilayah oleh Israel dari Yordania dan Mesir selama Perang Arab-Israel 1967, dan menciptakan lingkungan baru yang kondusif untuk perluasan produksi dan perdagangan. Perdamaian dan stabilitas akan mendorong kegiatan ekonomi domestik, menarik investasi asing, dan membuka pintu bagi koordinasi dan integrasi regional (Naqib, 2003).

Selain itu, komitmen masyarakat internasional untuk menanggung sebagian dari biaya program rekonstruksi Palestina dipandang sebagai pasokan modal dan devisa yang sangat dibutuhkan. Tujuh tahun pemerintahan sendiri yang terbatas, bagaimanapun, belum membawa perbaikan yang diharapkan ini. Sebaliknya, situasi ekonomi di Tepi Barat dan Gaza terus memburuk: mencapai proporsi krisis selama periode 1996-97, dengan peningkatan tajam dalam pengangguran, penurunan drastis dalam perdagangan, penyebaran kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kondisi keseluruhan isolasi dan blokade ekonomi oleh Israel. Pada tingkat ekonomi, meskipun ada beberapa perbaikan dalam lingkungan kebijakan yang dibawa oleh pembentukan otoritas nasional Palestina dan membongkar beberapa struktur berbahaya pendudukan, penjajahan Israel yang terus berlanjut atas tanah Palestina dan pembangunan permukiman Yahudi baru, serta memperluas yang lama, telah menciptakan suasana perselisihan yang terus terpelihara. Semuanya dimulai dari bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan orang-orang Palestina yang memprotes permukiman Israel serta kebijakan agraria telah berpotensi menghambat penandatanganan perjanjian damai. Ini menyebabkan kemerosotan dalam hubungan ekonomi dan mencegah gerakan serius menuju rekonstruksi dan pengembangan ekonomi Palestina (Prakoso et al., 2021).

Memang, situasi yang tidak dapat dipertahankan ini memicu letusan Intifada Al Aqsa pada tanggal 28 September 2000. Pemberontakan Palestina kedua ini, dimulai oleh pemuda Palestina yang berdemonstrasi menentang pendudukan dan melemparkan batu ke tentara Israel. Israel bereaksi dengan melepaskan kekuatannya secara penuh, dilengkapi dengan teknologi paling canggih, hingga menimbulkan banyak korban jiwa di kubu Palestina. Organisasi militan Palestina bereaksi terhadap kebrutalan Israel ini dengan menyerang tentara dan pemukim Israel, dan dengan gelombang serangan bom bunuh diri di kota-kota Israel, yang mengakibatkan kematian sejumlah warga sipil Israel. Ini telah menciptakan lingkaran setan eskalasi dari satu sisi dan kontraeskalasi dari sisi lain, menciptakan klimaks pada akhir Maret 2002 dengan

tentara Israel menyerang kembali sebagian besar Tepi Barat. Kampanye ini, yang dianggap sebagai operasi militer Israel terbesar di wilayah Palestina sejak 1967, telah mengakibatkan kehancuran total aparat keamanan dan polisi PA di Tepi Barat, kerusakan luar biasa pada infrastruktur Palestina, penggeledahan dan penjarahan sebagian besar kementerian dan berbagai lembaga swasta, dan penangkapan ribuan aktivis dan pejabat Palestina (Kaslam, 2021).

Pada tahun 2002, setelah empat minggu tentara Israel menarik diri dari dalam kota-kota besar dan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat dan pindah ke posisi di sekitar mereka. Namun, situasi ini tidak berlangsung lebih dari beberapa minggu. Sebagai tanggapan terhadap gelombang baru pembom bunuh diri, tentara Israel kembali dan menduduki kembali sebagian besar Tepi Barat pada 16 Juni 2002, menandakan runtuhnya Perjanjian Oslo. Sebagai akibat dari semua ini, situasi ekonomi telah memburuk secara besar-besaran. Pada akhir April, kerugian warga Palestina telah mencapai US \$ 3,49 miliar, yang setara dengan tiga perempat dari PDB Palestina. Menurut Bank Dunia, tingkat pengangguran di wilayah Palestina telah melewati angka 50 persen, dan setidaknya 50 persen warga Palestina hidup di bawah garis kemiskinan US \$ 2 per hari pada April. Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah memperingatkan bahaya memburuknya status kesehatan dan gizi perempuan dan anak-anak. Situasi yang sedang berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Sebaliknya, eskalasi dan tanggapan negatifnya telah mendominasi politik kedua belah pihak dan berpotensi mengancam perdamaian di timur tengah (Dana, 2021).

Untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, pemerintah AS perlu mengambil pendekatan yang lebih adil. Meskipun dapat dimengerti bahwa ia harus mengutuk kegiatan tertentu dari Palestina mengenai penargetan warga sipil Israel, itu juga harus mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara Israel yang telah mengakibatkan korban Palestina menjadi tiga kali lebih besar daripada Israel. Pada saat yang sama, AS tidak akan kredibel sebagai perantara yang jujur antara kedua pihak kecuali mematuhi hukum internasional dan menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan menjadi ilegal, dan tidak sesuai dengan solusi damai. Posisi Amerika baru yang seimbang, dan memungkinkan peran efektif dimainkan oleh PBB, Uni Eropa, dan Rusia, akan sangat membantu dalam memperkuat jalan menuju penciptaan proses perdamaian baru yang menghindari kesalahan Oslo, terutama dalam hubungan ekonomi. Disinilah Indonesia dengan populasi umat muslimnya yang terbesar di dunia akan mengambil peran sebagai perwakilan dunia islam dalam mencapai solusi damai mengatasi konflik Israel - Palestina (Juliana & Prakoso, 2022).

2. Peran Non-Mediasi Pemerintah Indonesia

Dalam urusan konflik palestina - Israel Indonesia selama ini mengambil peran non-mediasi yang secara konkrit dapat diartikan sebagai politik himbuan dan kecaman melalui forum multilateral. Misalnya saja melalui mekanisme di PBB *commite on the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people*, gerakan Non-blok atau di organisasi konferensi islam (OKI). Peran non-mediasi ini

membuat Indonesia tidak bisa langsung berhubungan dengan pihak Israel oleh karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatic. Ada alasan historis dan politis mengapa Indonesia tidak bisa membuka hubungan diplomatic dengan Israel (Yesidalali, 2007).

Pendekatan non-mediasi yang sudah di adopsi Indonesia sejak presiden Soekarno saat era Republik Indonesia Serikat yang pada waktu itu Mohammad Hatta menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan merangkap sebagai Perdana Menteri. Setelah penyerahan kedaulatan melalui konferensi meja bundar (KMB) pada 1949 presiden Chaim Weizsmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mengirimkan ucapan selamat kepada Indonesia dan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 1950. Mohammad Hatta menanggapi respon atas Israel itu dengan baik namun tanpa pengakuan sebaliknya atas berdirinya negara Israel sejak 14 Mei 1948.

Pada tahun 2017 Presiden AS Donal Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang pada saat itu menerima kecaman dari negara-negara Arab termasuk juga Indonesia. Selanjutnya OKI mengadakan konferensi luar biasa di Turki. Pada bulan Desember 2017 itu juga Presiden Jokowi memaparkan 6 (enam) poin usulan dan sikap negara-negara OKI terhadap langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apakah usulan ini akan berjalan efektif seperti yang diharapkan? Faktanya pada bulan Mei 2018 kedutaan besar AS telah pindah ke Yerusalem. Uni Emirat Arab sebagai anggota OKI malah telah membuka hubungan diplomatic dengan Israel pada 2021. Sementara Qatar dan Saudi Arabia sedang dalam penajakan dan diharapkan juga untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Jika diperhatikan datanya, sebenarnya sudah ada 4 (empat) negara yang telah mengikuti jejak AS dengan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem ditambah 10 (sepuluh) negara yang memperluas pelayanan kantornya di Yerusalem (Ikmal Setiadi, 2021).

Saat ini status palestina masih menjadi *non-member observer state* oleh PBB, sampai April 2022 lalu pengakuan dari 193 negara PBB antara Palestina dan Israel terdiri dari 138 mengakui Palestina dan 165 negara mengakui berdirinya negara Israel. Pda bulan September 2022 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan terkait soal Palestina ini adalah "*one of the main reasons the issue of Palestine on the agenda of the Non-Aligned Movement and remains unresolved is due to the gap between the commitments and implementations. We don't walk the talk, we just talk, but we don't do anything.*" Inilah kenyataan pahit dari cara multilateral alias Non-mediasi yang selama ini Indonesia ambil dalam mengatasi konflik antara Palestina – Israel.

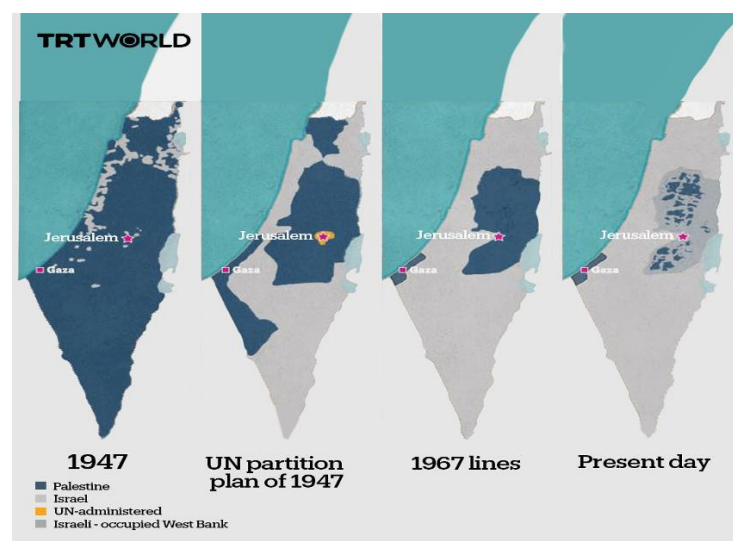
3. Peran Mediasi Pemerintah Indonesia

Peran non mediasi dalam konflik telah diambil Indonesia selama tiga seperempat abad ternyata tidak mempunyai pengaruh yang signifikan untuk merubah nasib rakyat Palestina. Bagaimana jadinya jika Indonesia mengubah pendekatannya menjadi peran mediasi. Sudah ada daftar Panjang berbagai mediasi yang dilakukan seperti *Camp David Accords* pada 1978, *Oslo Accord* pada 1993 sampai 1995 dan yang terbaru adalah *Abraham Accord* pada 2015. Itu semua adalah contoh-contoh nyata dalam peran mediasi sepanjang puluhan

tahun yang melibatkan think tank terbaik dunia yang pada intinya adalah membahas mengenai *two state solutions*. Gagasan tentang *two state solution* sendiri sudah mulai dibicarakan oleh PBB Ketika meluncurkan *partition plan* pada 1947 yang membagi dua wilayah Palestina untuk orang arab dan yahudi dibawah pengawasan internasional yang sejalan dengan resolusi PBB nomor 194. Peta yang dapat diliha pada Gambar. 2 pada intinya berbicara tentang two state solution yang masalah mendasarnya adalah batas wilayah (Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, 2021).

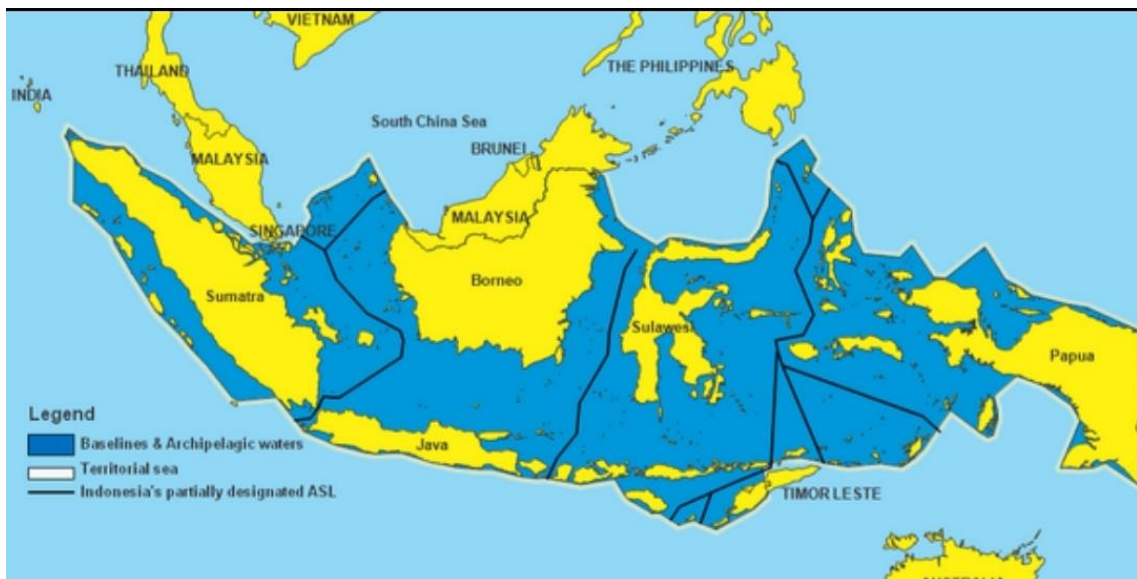
Dapat dilihat perubahan wilayah sejak 1947 sampai *present day*, jelas saja pihak palestina tidak dapat menerima perbatasan versi pet aini. Perdana Menteri Palestina jelas ingin *status quo* pra 1967 diakui sebagai peta wilayah Palestina yang sebenarnya. Terlepas dari ketidakpuasan dibalik perubahan wilayah ini dari waktu ke waktu, faktanya apa yang memungkinkan peta ini dapat berubah hanyalah dengan jalan mediasi. Memang benar berbagai Langkah mediasi tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan tetapi kemungkinan perdamaian antara palestina - Israel hanya dapat ditempuh dengan mediasi. Hal tersebut yang dilihat oleh Presiden Abdurahman Wahid yang berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar paragraph pertama mukadimmah UUD 1945 yaitu mengilangkan penjajahan atas Bangsa Palestina (Madrohim, & Prakoso, 2021).

Pertanyaannya sekarang adalah apakah Indonesia dapat terlibat langsung pada model non-mediasi, jelas saja tidak bisa. Karena posisi diplomatik Indonesia adalah asimetris dan bukan simetris, Indonesia hanya bisa berkomunikasi dengan pihak Palestina dan tidak dengan Israel karena belum memiliki hubungan diplomatik. Inti dibalik konsep *two state solution* adalah mengenai perbatasan, dimana Palestina masih tidak berdaya dalam memperjuangkan kedaulatan wilayahnya. Dapat dilihat pada peta Gambar 2, *present day* jika peta itu di *zoom in* secara dominan Israel menguasai sebagian besar tepi barat Palestina. Infrastruktur untuk menyalurkan energi dan air yang sebagian besar dikuasai oleh Israel ini juga yang memperkuat posisi dan daya tawar Israel.



Gambar 2. Peta Wilayah Palestina dari Tahun 1947 hingga 2023 saat ini
Sumber : Wilson Dizard, 2023

Oleh karena itu konsep *two state solution* bukan merupakan solusi termudah dalam menyelesaikan konflik dibalik peta yang berlubang seperti ini. Indonesia memiliki sumbangsih dan pengalaman dalam berdiplomasi, seperti pada tahun 1957 yang mengemukakan tentang Deklarasi Djuanda supaya wilayah perairan yang memisahkan daratan itu tidak menjadi faktor yang membuat peta kedaulatannya berlubang. Dalam Deklarasi Djuanda ini Bangsa Indonesia memperjuangkannya dari tahun 1957 hingga mendapatkan pengakuannya melalui UNCLOS 1982 yang menjadi simbol berhasilnya diplomasi Indonesia. Dalam kacamata hukum internasional, wilayah palestina dapat diistilahkan dengan *non-contiguous territory* atau teritori yang tidak berdekatan atau tidak berdampingan satu sama lainnya. Sementara sekalipun wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut, tapi merupakan satu kesatuan di mata hukum internasional atau yang dapat disebut sebagai *contiguous territory*, seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Peta *Contiguous Territory* Indonesia pada Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982

Sumber : Jurnal Maritim, 2022

Oleh karena Indonesia mempunyai pengalaman diplomasi kedaulatan wilayahnya melalui UNCLOS 1982 yang dimulai sejak 1957 yang kemudian berhasil pada 1982. Betapa strategisnya peran Indonesia jika benar-benar mengambil sikap dengan cara diplomasi secara langsung dengan masuk sebagai negara kelima dalam *the quartet on the middle east* atau negara empat aktor utama yang menjaga perdamaian di timur tengah. Khususnya dalam isu Israel - Palestina ini, *the quartet* ini terdiri dari PBB, Amerika, Uni Eropa dan Rusia yang menjadi aktor utama dalam jalannya mediasi di timur tengah. Indonesia berpotensi masuk sebagai negara kelima sebagai aktor utama karena memiliki jumlah populasi umat islam terbesar di dunia jelas dapat merepresentasikan dunia islam yang nantinya dapat disebut sebagai *the quintet on the middle east* dalam menjaga perdamaian di timur tengah serta menjadi negosiator guna

memberikan solusi damai yang adil dan seimbang terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina (Listiyono et al., 2019).

Hanya saja cara mediasi atau diplomasi langsung dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel ini bukan tanpa hambatan. Perlawanan baru-baru ini di Indonesia terhadap pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel dapat dikaitkan dengan sikap antipati terhadap negara tersebut. Mayoritas individu menyatakan antipati terhadap Israel atas dasar solidaritas terhadap rakyat Palestina. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, kedua negara mempertahankan hubungan bilateral yang berkelanjutan terutama di bidang perdagangan dan pariwisata. Bersamaan dengan konstestasi pemilu presiden yang akan diadakan pada 2024, mampukah calon presiden selanjutnya memberikan pendekatan baru dalam mengatasi konflik antara Israel - Palestina tanpa mendapat penolakan dan pertentangan dari dalam negeri (Prakoso, 2021).

4. Peran Indonesia Melepas Ketergantungan Ekonomi Palestina dengan Israel

The Economic Disengagement Plan (EDP) adalah suatu mekanisme yang dibentuk agar Palestina terhindar dari ketergantungan ekonomi terhadap Israel. Saat kunjungan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh ke Indonesia, Presiden Jokowi mengemukakan peran Indonesia agar Palestina tidak lagi begitu bergantung pada blockade dan isolasi ekonomi dari Israel dengan mengusulkan pembangunan baru untuk ekonomi Palestina melalui fokus pada ketahanan dan pembangunan berbasis cluster, dan Presiden Jokowi juga menjelaskan mekanisme penerapan visi ini untuk pembangunan ekonomi Palestina. Rencana pelepasan pada dasarnya adalah perlawanan yang sah terhadap kekuatan pendudukan Israel yang bertujuan untuk beradaptasi dengan pendudukan dan melihat cara untuk hidup berdampingan dengannya. Pelepasan tidak berarti boikot Israel dan berbeda dari gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS), Pemerintah Indonesia dan Palestina bekerjasama meningkatkan ekonomi nasional melalui pembangunan dan perdagangan dengan negara-negara Arab, negara-negara di ASEAN dan Internasional. Konsep ini dibangun di atas tiga pilar utama yang berasal dari visi yang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada Israel dan mempertahankan pembangunan ekonomi Palestina (Bakri, 2017).

Pilar utama visi EDP adalah pembangunan ekonomi melalui klaster di berbagai sektor ekonomi Palestina, seperti pertanian, industri dan pariwisata. Pengembangan klaster ini mengambil pendekatan khusus, dengan berbagai kota Palestina memanfaatkan keunggulan komparatif yang ditawarkan masing-masing daerah. Rencana tersebut juga menyediakan paket insentif bagi setiap daerah untuk mencapai potensinya, termasuk membangun infrastruktur, memungkinkan pembebasan pajak, dan menawarkan pendanaan untuk pengembangan proyek ekonomi independen. Misalnya, Betlehem akan diberikan bantuan untuk mengembangkan 'klaster pariwisata', Hebron 'klaster industri' dan kota-kota Jenin dan Qalqilya bersama-sama 'klaster pertanian'. Rencana ini dijalankan adalah untuk meningkatkan produksi nasional, sehingga Palestina dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya bahkan berpotensi untuk mengekspor produknya kepada negara-negara lain seperti. Bahkan, pada

Januari 2019, PA meluncurkan klaster pertanian pertama di distrik Qalqilya, dengan biaya \$23 juta yang didanai dalam kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan kotamadya (Al-Awsat, 2019).

Pilar kedua dari rencana pelepasan berfokus pada menemukan mitra bisnis yang berbeda, terutama negara-negara Arab dan ASEAN, untuk menggantikan perdagangan dengan Israel. Otoritas Palestina dan Pemerintah RI berharap dapat memobilisasi dukungan internasional untuk memfasilitasi perdagangan luar negeri Palestina dan kerja sama dengan mitra dagang yang dapat memberikan bantuan teknis, administratif dan logistik untuk meningkatkan perdagangan Palestina dan membantu ekonomi Palestina. Tujuannya tidak hanya untuk melepaskan diri dari Israel tetapi juga untuk mengembangkan ekonomi yang membantu Palestina bergantung pada diri mereka sendiri. Untuk mengembangkan mitra alternatif, Pemerintah RI melalui Rumah Sakit Indonesia di Gaza dapat mengambil beberapa langkah, termasuk menghentikan atau mengurangi transfer pasien ke rumah sakit Israel dan sebagai gantinya mendapatkan layanan dari rumah sakit lokal Palestina, Yordania dan Arab lainnya. Selanjutnya, Pemerintah RI dengan pengalaman diplomasinya dengan menjadi ketua ASEAN serta sukses dalam menyelenggarakan KTT G-20 menyerukan pendalaman hubungan dan pengembangan kerja sama di bidang ekonomi, komersial, dan budaya dengan negara-negara di dunia internasional. Misalnya, pada Oktober 2022, 11 Perdana Menteri Shtayyeh mengunjungi Indonesia untuk penguatan kerjasama bilateral guna membantu rencana pelepasan ketergantungan ekonomi terhadap Israel. Dalam Kerjasama tersebut mengatur panggung untuk kolaborasi dengan Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, transportasi dan perdagangan. Untuk meningkatkan peluangnya menemukan mitra bisnis alternatif dan andal bagi Indonesia dan Palestina.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia melalui paragraph pertama pembukaan UUD 1945 memiliki kewajiban mewujudkan perdamaian dunia dengan menciptakan lingkungan baru yang bebas dari konflik kedaulatan, dan otoritas yang jelas dan terdefinisi dengan baik atas kegiatan ekonomi dapat membawa ekonomi Palestina jauh menuju jalur pembangunan dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Lingkungan baru dan memungkinkan seperti itu akan memperkuat hubungan ekonomi baru antara kedua negara yang dapat mengeksplorasi kemungkinan saling melengkapi dan rasionalisasi, dan mengakui perlunya ekonomi Palestina untuk menggunakan langkah-langkah untuk melindungi diri dari ketergantungan pada satu mitra dagang utama.

Saran yang perlu ditindaklanjuti kedepannya adalah untuk menetapkan Strategi Dan Implementasi Dalam Menghadapi Dampak Perang Israel dan Hamas Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi:

1. Pemerintah Indonesia diperkirakan akan secara proaktif menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi mengingat meningkatnya harga berbagai komoditas dan minyak mentah di pasar internasional.

2. Terus mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan energi gas bumi untuk keperluan industri di lingkungan perumahan guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi.
3. Memainkan peran diplomasi secara langsung dengan menjadi negara kelima dari empat negara yang saat ini sebagai aktor utama dalam menjaga perdamaian di timur tengah.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat difasilitasi dengan temuan penelitian ini, khususnya dalam bidang kajian diplomasi pertahanan. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih tepat, sebaiknya memperluas literatur yang digunakan. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang terbatas karena dilakukan hanya melalui teknik tinjauan literatur dan studi literatur. Untuk penelitian selanjutnya, pustaka yang digunakan bisa lebih luas dan ditambahkan metode wawancara untuk memperkuat argumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Awsat, A.-S. (2019). *The Plan of 'Development Clusters' in the West Bank to Disengage from Israel*. <https://tinyurl.com/yxs626qx>
- Alasttal, A., Magassing, A. M., Maskun, M., & Sakharina, I. K. (2023). The Role of the United Nations in Protecting the Right to Development in Occupied Palestine. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 138-156. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.25836>
- Bakri. (2017). Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Al-Buhuts*, 1(1), 33-52.
- Caflisch, L. (1963). The Law of State Succession Theoretical Observations. In *Netherlands International Law Review* (Vol. 10, Nomor 4). <https://doi.org/10.1017/S0165070X00028412>
- Dana, T. (2021). Dominate and Pacify: Contextualizing the Political Economy of the Occupied Palestinian Territories Since 1967. *Political Economy of Palestine*, 25-47. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68643-7_2
- Diamond, L. (1996). *Multi-track diplomacy: a systems approach to peace / Louise Diamond, John McDonald*. <https://lib.ui.ac.id>
- Fraihat, I. (2022). The Palestinian Economic Disengagement Plan from Israel: an opportunity for progress or an illusion? In *Third World Quarterly* (Vol. 43, Nomor 7). <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2060813>
- Johnson, L. E., Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1994). Theories of Political Economy. In *Southern Economic Journal* (Vol. 60, Nomor 4). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.2307/1060455>
- Juliana, G. E. S., & Prakoso, L. Y. (2022). *Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth*.
- Jurnal Maritim. (2022). *Hak Lintas Kapal Asing dalam UNCLOS 1982*. Jurnal Maritim. <https://jurnalmaritim.com/hak-lintas-kapal-asing-dalam-unclos-1982/>
- Kasih Prihantoro, Lukman Yudho Prakoso, Rianto, Seri Depy Sugiyani, M. I. S. (2021). *BELA NEGARA PERSPEKTIF TEKNOLOGI PERTAHANAN*. CV. Aksara Global Akademia.
- Kaslam, K. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tunjauan Geografi Politik). *Review of International Relations* 2021, 3(2), 179-188. <https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/23527>

- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 103–116.
- Madrohim, M., & Prakoso, L. Y. (2021). The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.245>
- Naqib, F. M. (2003). Economic aspects of the Palestinian-Israeli conflict: The collapse of the Oslo Accord. *Journal of International Development*, 15(4), 499–512. <https://doi.org/10.1002/jid.999>
- NUGRAHA, D. W. (2023). *Boikot Produk Israel: Antara Solidaritas Kemanusiaan dan Dampak Ekonomi Lokal*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/15/boikot-produk-israel-antara-solidaritas-kemanusiaan-dan-dampak-ekonomi-lokal>
- Prakoso, L. Y. (2021). Implementation of Defense Policy Against Threats for Securing International Shipping Lanes in the Sunda Strait. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.263>
- Prakoso, L. Y., Prihantoro, K., & Suhirwan, S. (2021). Urgensi Transformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan. In M. I. Setiadi (Ed.), CV. Aksara Global Akademia.
- Prokhovnik, R. (2007). Sovereignties: Contemporary Theory and Practice. In *Sovereignties: Contemporary Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1057/9780230593527>
- Salmon, F. (2023). *The Israel-Hamas war's economic toll on Gaza*. axios.
- Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, A. G. D. (2021). National Defense Policy by Strengthening Defense Strategy: Study of the Development of a Naval Air Base in Bengkulu. *Italienisch*, 11(2).
- Wilson Dizard. (2023). *By leaving UNESCO, the US is trying to rewrite history*. TRT World. <https://www.trtworld.com/opinion/by-leaving-unesco-the-us-is-trying-to-rewrite-history-12714866>
- Yesidalali, B. (2007). *Second Track (Unofficial) Diplomacy Efforts to Mitigate Conflicts between Turks and Greeks, and Turks and Armenians*.